

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dhayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya. Untuk memberikan panduan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi telah diterbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

### **I.2 TUJUAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI**

*Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Jambi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu menyusun *road map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Jambi.

### **I.3 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Dasar hukum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi periode 2019-2023, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## **BAB II**

### **KONDISI DAN PERMASALAHAN**

#### **II.1 KONDISI DAN PERMASALAHAN BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, Pemerintah Kota Jambi mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Dimana Peraturan Walikota tersebut sekaligus menjadi acuan dan pedoman budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Upaya yang dilakukan belum begitu berhasil membentuk budaya kerja seperti yang diharapkan, masih ditemukan adanya pegawai yang belum menaati ketentuan jam kerja dan belum konsisten dalam melayani masyarakat.

Untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang disiplin, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dengan melaksanakan program revolusi mental dimana mengikutsertakan pejabat eselon II dan III dalam diklat revolusi mental.

Dengan adanya program revolusi mental aparatur diharapkan terbentuk aparatur yang berkompetensi dan bertanggung jawab, memahami kebutuhan publik dan peka terhadap lingkungan, beretika, membuka/memberikan akses yang mudah bagi masyarakat, inovatif dan proaktif, bersih dan menolak gratifikasi, adil sopan ramah, dan sabar, disiplin, tepat janji dan tepat waktu serta menjadi contoh teladan dan profesional.

#### Permasalahan

Permasalahan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kota Jambi, khususnya di bidang manajemen perubahan adalah:

1. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal
2. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik
3. Masih adanya opini masyarakat terkait ketidakpastian (uncertainty) waktu dan biaya pelayanan perizinan, menjadikan masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi sehingga memunculkan calo perizinan

## **II.2 KONDISI DAN PERMASALAHAN PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Jambi pada dasarnya telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut mengatur keterlibatan publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konsultasi publik. Konsultasi publik merupakan salah satu wujud penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan terutama asas keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mulai dari perencanaan sampai pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

### Permasalahan

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat Peraturan Daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan Peraturan Daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumannya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

## **II.3 KONDISI DAN PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI**

Penataan organisasi Pemerintah Kota Jambi telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan belum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi terkait nomenklatur perangkat daerah.

### Permasalahan

1. Masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah
2. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
3. Masih rendahnya kualitas penataan kembali kelembagaan di daerah

## **II.4 KONDISI DAN PERMASALAHAN TATALAKSANA**

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Pemerintah Kota Jambi memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan lebih baik dari sebelumnya. Komitmen tersebut dilakukan melalui penerapan tatalaksana pelayanan secara konsisten yang dituangkan dalam SOP dan Standar pelayanan.

Untuk mendukung tatalaksana pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tetapi belum berdiri sendiri dan masih menyatu dengan Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi.

### Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Belum optimalnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen Pemerintah Kota Jambi
3. Masih rendahnya kualitas penataan ketatalaksanaan

## **II.5 KONDISI DAN PERMASALAHAN SISTEM SUMBER DAYA (SDM) APARATUR**

Menghadapi tantangan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, beragam, dan sukar diprediksi maka perlu didukung penguatan infrastruktur, salah satunya melalui penataan dan penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penataan dilakukan tidak hanya sebatas penghitungan jumlah, tetapi juga peningkatan kualitas, kompetensi, pola pikir, budaya kerja, kesejahteraan, serta seluruh sistem terkait aparatur yang didukung secara elektronisasi guna pencapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi.

Guna mengetahui jumlah kebutuhan pegawai perjabatan dalam rangka memperkuat penanganan beban kerja, maka dilakukan penghitungan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan Analisis jabatan dan Peta Jabatan.

Dalam rangka pengukuran kompetensi individu telah sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan dalam jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai, diperlukan profil kompetensi pegawai yang diperoleh dari hasil assesment penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi ini dilakukan tidak hanya terbatas pada pejabat struktural, namun dilaksanakan untuk semua jenjang.

## Permasalahan

1. Belum optimalnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
2. Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
3. Belum optimalnya disiplin SDM aparatur
4. Belum optimalnya efektivitas manajemen SDM aparatur
5. Belum optimalnya kapasitas dan profesional SDM aparatur

## **II.6 KONDISI DAN PERMASALAHAN PENINGKATAN PENGAWASAN**

Pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan membuka saluran pengaduan masyarakat melalui sistem pengaduan keluhan masyarakat secara online (Si-Kesal). Dalam penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menyediakan sarana dan prasarana dalam menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang langsung di tindak lanjuti oleh instansi terkait.

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilakukan dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi serta menjamin pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Tim Saber Pungli melalui Inspektorat Kota Jambi.

Benturan kepentingan merupakan salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia. Benturan kepentingan terjadi ketika seseorang terlibat dalam berbagai kepentingan yang mengakibatkan seseorang harus mengorbankan kepentingan lainnya, terutama dalam pelayanan publik Pemerintah kota Jambi.

Program penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan melalui penguatan implementasi SPIP. Pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) juga merupakan implemnatsi atas ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk terwujudnya SPIP yang kuat dan efektif, maka kelima unsur SPIP terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

## Permasalahan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dalam embangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan Reformasi Birokrasi.

### **II.7 KONDISI DAN PERMASALAHAN AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik yang memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## Permasalahan

Selain masih terbatasnya pemahaman seluruh unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tentang teknis merumuskan indikator kinerja utama perangkat daerahnya. Lemahnya sistem koordinasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah turut menjadi pemicu masih belum baiknya sistem perencanaan maupun penyusunan laporan kinerja di daerah. Ditambah banyaknya dokumen pelaporan yang diwajibkan oleh pusat dengan bentuk dan format yang berbeda-beda sangat menambah beban bagi aparatur di daerah.

### **II.8 KONDISI DAN PERMASALAHAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

Kondisi pelayanan publik Pemerintah Kota Jambi, dimana telah menggunakan sistem aplikasi pelayanan perizinan secara elektronik dan telah membentuk City Operational Centre (COC) sehingga dapat dilakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan cepat, mudah dan murah. Adapun nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal) dari Ombudsman RI, dimana Pemerintah Kota Jambi telah berada di Zona Hijau.

## **BAB III**

### **CAPAIAN DAN PELAKSANAAN ROAD MAP PERIODE 2013-2018**

#### **III.1 GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Gambaran hasil capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/99/AA.05/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 adalah 60,10 (predikat B)
2. Opini BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP).
3. Nilai PMPRB berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/51/RB.06/2018 Tanggal 08 Maret 2018 Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 adalah 55,74 (Predikat CC)
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional dengan skors 3,0668

#### **III.2 CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap setiap program dan kegiatan Reformasi Birokrasi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi 2013-2018, adalah sebagai berikut:

##### **I. MANAJEMEN PERUBAHAN**

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam:
  - 1) Keputusan Walikota Jambi Nomor 244 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Jambi Tahun 2019-2023
  - 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 253 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kota Jambi Tahun 2019-2023.



- b. Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan:
  - 1) Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018
  - 2) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor 131 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017
- c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi  
Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik sesuai dengan dokumen roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2013-2018
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja  
Keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Perjanjian Kinerja 2018.
- e. Ditetapkan Peraturan untuk mengatur manajemen perubahan dan pengembangan budaya kerja:
  - 1) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
  - 2) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Walikota jambi Nomor 23 tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- f. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
  - 1) Membuat rencana aksi program Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019-2023
  - 2) Melaksanakan rencana aksi program Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Kota Jambi tahun 2019-2023 yang telah disusun.

## **II. PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah tidak tetap dan tidak harmonis
  - 1) Keputusan DPRD Kota Jambi Nomor 25/Kep.DPRD/Propemperda/2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2018
  - 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Reviu Produk Hukum Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018
  - 3) Keputusan Walikota Jambi Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Harmonisasi Draft Produk Hukum Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018
- b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
  - 1) Surat DPRD Kota Jambi Nomor 172.4/72/DPRD/2017 perihal undangan rapat dengan pendapat rencana pembahasan Ranperda Tahun Anggaran 2018
  - 2) Surat DPRD Kota Jambi Nomor 172.4/880/DPRD/2017 perihal undangan rapat koordinasi rencana penyusunan Propemperda Tahun Anggaran 2018
  - 3) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Rapat Penyusunan Program Pembentukan Perda untuk Tahun Anggaran 2018 Kota Jambi

## **III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI**

Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, yaitu:

- 1) Keputusan Walikota Jambi Nomor 120 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Penataan Kelembagaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2017
- 2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 3) Surat Walikota Jambi kepada Gubernur Jambi Nomor 061/1168/Org tanggal 10 Oktober 2017 perihal penyampaian revisi perda tentang evaluasi kelembagaan
- 4) Surat Walikota Jambi Nomor 061/761/Org tanggal 17 Juli 2017 perihal evaluasi kelembagaan

#### **IV. PENATAAN TATALAKSANA**

- a. Rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:
  - 1) Buku masteplan Smart City (2018-2028)
  - 2) Kesepakatan Bersama Kementerian Kominfo dengan Pemerintah Kota Jambi
  - 3) Keputusan Walikota Nomor 245 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Smart City
  - 4) Keputusan Walikota Nomor 244 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Jambi Smart City
  - 5) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 21 tahun 2018 tentang Penunjukkan Operator NOC/Comand Center Pemerintah Kota Jambi
- b. Keterbukaan informasi publik  
Kebijakan keterbukaan informasi publik, yaitu:
  - 1) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  - 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 406 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi
  - 3) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Opini Publik Tahun Anggaran 2018
  - 4) Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kota Jambi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2018

#### **V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
  - 1) Informasi jabatan
  - 2) analisis beban kerja
  - 3) Rekap analisis beban kerja
  - 4) Kebutuhan pegawai
  - 5) Peta jabatan

- b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
  - 1) Standar kompetensi jabatan dengan penilaian kompetensi seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi (executive summary)
  - 2) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pusat dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara tentang pelaksanaan assessment seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi Nomor 03/HKU/2017, Nomor 82/Pl.1/HKM.030 tanggal 10 Februari 2017.
  - 3) Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 03 Maret 2017 Surat Pengantar Kepala kepolisian Daerah Jambi Karo SDM kepada Walikota Jambi Nomor B/02/I/2017 tanggal 03 Januari 2017
- c. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka
  - 1) Keputusan Walikota Jambi Nomor 123 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016
  - 2) Pengumuman tentang seleksi pengisian jabatan tinggi pratama secara terbuka di lingkungan Pemda Kota Jambi
- d. Penetapan Kinerja Individu
  - 1) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor 800/718/BKPSDMD tanggal 20 Juni 2017 tentang Penegasan Penyampaian Rekapitulasi Absen PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
  - 2) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor 800/1095/BKPSDMD tanggal 15 September 2017 tentang Elektronik Laporan Kinerja
  - 3) Surat Edaran Sekretaris Daerah kota Jambi Nomor 800/1736/BKPSDMD tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2017 dan Penyusunan Sasaran Kerja PNS Tahun 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.  
Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- f. Sistem informasi kepegawaian  
Peraturan Walikota Jambi Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

## **VI. Penguatan Akuntabilitas**

- a. Keterlibatan pimpinan
  - 1) RPJMD Kota Jambi 2013-2018
  - 2) Renstra perangkat daerah 2013-2018
  - 3) Penetapan Kinerja 2018
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
  - 1) Permenpan Nomor 53 Tahun 2014
  - 2) E-Sakip
  - 3) Keputusan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan laporan Kinerja Kota Jambi Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah kota Jambi tahun 2018

## **VII. Penguatan Pengawasan**

- a. Penetapan tentang gratifikasi, yaitu:
  - 1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
  - 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 246 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- b. Penerapan SPIP  
Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- c. Telah ditetapkan kebijakan SOP pengaduan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- d. Penanganan benturan kepentingan  
Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Jambi
- e. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
  - 1) Rekomendasi APIP yang telah direkap dan didukung dengan komitmen pimpinan
  - 2) APIP telah didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas yang dibuktikan dengan DUK Inspektorat
  - 3) APIP telah didukung dengan anggaran yang memadai
  - 4) APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko yang dibuktikan dengan PKPT berbasis resiko tahun 2018

## **VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

### **a. Standar pelayanan**

- 1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2015 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perjanjian Terpadu Kota Jambi
- 2) Keputusan Kepala BMPPT Kota Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan BMPPT Kota Jambi
- 3) Keputusan Kepala Dinas BMPPT Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

### **b. Budaya pelayanan prima**

- 1) Mengikuti Bimtek pelayanan yang diselenggarakan oleh BKD Kota Jambi
- 2) BMPPT telah mempunyai website, baner, pengumuman, memasang iklan di media cetak, media televisi lokal Jambi
- 3) BMPPT telah mempunyai sarana layanan terpadu/terintegrasi dengan menyediakan loket pembayaran retribusi kebersihan, loket BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran retribusi HO, IMB, izin trayek di loket Bank Jambi dalam satu kawasan kantor BMPPT Kota Jambi

### **c. Pengelolaan pengaduan**

- 1) Keputusan Kepala BMPPT Nomor 15 tahun 2014 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan pelayanan Perizinan BMPPT Kota Jambi
- 2) Keputusan Walikota Jambi Nomor 66 tahun 2016 Tanggal 23 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Fasilitas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Tahun Anggaran 2016
- 3) Laporan kegiatan fasilitas penanganan pengaduan masyarakat Tahun Anggaran 2017

### **d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan**

- 1) Buku Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat 2017
- 2) Keputusan Kepala BMPPT Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Pada Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi Tahun Anggaran 2017

e. Pemanfaatan teknologi informasi

1) [dpmptsp.jambikota.go.id](http://dpmptsp.jambikota.go.id)

2) Telah dilakukan perbaikan secara terus-menerus sesuai dengan nota dinas Kepala Dinas KOMINFO Nomor 489/056/Diskominfo tanggal 26 Januari 2018.

### **III.3 ISU STRATEGIS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2019-2023 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa isu dan permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode 2019-2023 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Integrasi dan Akuntabilitas Aparatur Melalui Revolusi Mental
2. Kualitas akuntabilitas kinerja individu masih sulit untuk di ukur
3. Peningkatan profesionalisme pengawasan dan pembangunan zona integritas
4. Kelembagaan birokrasi dengan agenda prioritas desain kelembagaan birokrasi, penataan kelembagaan, penyusunan nomenklatur jabatan dan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan evaluasi jabatan
5. Penataan peraturan perundang-undangan dengan merevisi dan mensinkronisasikan peraturan daerah dan peraturan walikota yang tidak sesuai dengan perkembangan dan yang masih tumpang tindih
6. Pengembangan e-government secara terintegrasi, penguatan dan perbaikan SOP dan Standar Pelayanan, peningkatan kualitas e-procurement dan manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK.
7. Sistem rekrutment pegawai yang transparan dan akuntabel, pengembangan database dan sistem informasi aparatur, penegakan disiplin pegawai dan pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepatuhan perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

## BAB IV

### AGENDA PRIORITAS DAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

#### IV.1 ISU STRATEGIS DAN AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI

Tabel 1

#### ISU STRATEGIS DAN AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019-2023

NO	ISU STRATEGIS	AGENDA PRIORITAS 2019-2023	TIM PELAKSANA
1.	Membangun Integrasi dan Akuntabilitas Aparatur Melalui Revolusi Mental	a. Penguatan Pelaksanaan RB b. <i>Quick Wins</i> RB c. Revolusi Mental Aparatur d. Penguatan Integritas e. Penataan Perundang-Undangan f. Penguatan Budaya Kerja	- Bidang Manajemen Perubahan  - Bidang Peraturan Perundang – Undangan.
2.	Akuntabilitas Kinerja	a. Penyempurnaan SAKIP b. Implementasi SAKIP, LPPD dan LKPJ Sebagai Pilar Manajemen Kinerja.	- Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
3.	Pengawasan	a. Peningkatan Profesionalisme APIP b. Pembangunan Zona Integrasi c. Pengawasan Wajib LHKPN dan LHKASN.	- Bidang Penguatan Pengawasan.
4.	Kelembagaan Birokrasi	a. Desain Kelembagaan Birokrasi b. Penataan Kelembagaan c. Penyusunan Nomenklatur Jabatan d. Pemberian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Evaluasi Jabatan.	- Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi.



5.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi</li> <li>b. Harmonisasi Produk Hukum Daerah</li> <li>c. Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum</li> <li>d. Pengarsipan Hukum On-Line</li> <li>e. Diseminasi/Sosialisasi Produk Hukum.</li> </ul>	- Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
6.	Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan <i>e-Government</i> Secara Terintegrasi</li> <li>b. Penguatan dan Perbaikan SOP dan Standar Pelayanan</li> <li>c. Peningkatan Kualitas <i>e-procurement</i> (Lelang Berbasis IT)</li> <li>d. Manajemen Kearsipan Birokrasi Berbasis TIK.</li> </ul>	- Bidang Penataan Ketata Laksanaan.
7.	SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Rekrutmen Pegawai</li> <li>b. Analisis, Evaluasi Jabatan, dan Standar Kompetensi</li> <li>c. Asesment Kompetensi Individu</li> <li>d. Sistem Penilaian Kinerja Individu</li> <li>e. Pengembangan Database dan Sistem Informasi Aparatur</li> <li>f. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM</li> <li>g. Penegakan Disiplin Pegawai</li> <li>h. Reward.</li> </ul>	- Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM.

8.	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>b. Modernisasi Sistem dan Manajemen Pelayanan Publik (Pelayanan berbasis on-line)</li> <li>c. Monitoring dan Supervisi Kinerja Pelayanan Publik</li> <li>d. Membuka Ruang Partisipasi Publik melalui aplikasi <i>Si-Kesal</i> dan Pengukuran SKM.</li> <li>e. Penguatan integrasi Dalam Pelayanan Publik Dengan Penerapan Sanksi Tegas Terhadap Pelanggaran.</li> </ul>	- Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
----	------------------	--	---

#### IV.2 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI

Tabel 2

##### AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019-2023

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG DIHARAPKAN
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Penerapan/Internalisasi Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode etik, dan Kode Perilaku, Termasuk Penguatan Budaya Kinerja dan Budaya Pelayanan</li> <li>b. Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Positif di Setiap Instansi</li> <li>c. Meningkatnya integrasi aparatur</li> <li>d. Meningkatnya Profesionalisme aparatur</li> <li>e. Meningkatnya Citra Positif aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat</li> <li>f. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.</li> </ul>

2.	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Kapasitas APIP</li> <li>b. Meningkatnya Penerapan Sistem Pengawasan yang Independen, Profesional, dan Sinergis</li> <li>c. Meningkatnya Penerapan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN</li> <li>d. Meningkatnya Efisiensi Penyelenggaraan Birokrasi</li> <li>e. Menurunnya Tingkat Penyimpangan oleh Aparatur</li> <li>f. Meningkatnya Tertib Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.</li> </ul>
3.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja yang Terintegrasi</li> <li>b. Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Yang Adil, transparan, dan profesional</li> <li>c. Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja pegawai</li> <li>d. Meningkatnya akuntabilitas aparatur.</li> </ul>
4.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Ketetapan Ukuran, ketetapan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Perangkat Daerah</li> <li>b. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah</li> <li>c. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan Perangkat Daerah</li> <li>d. Meningkatnya sinergisme pelaksanaan tugas masing - masing Perangkat Daerah</li> <li>e. Meningkatnya Kinerja aparatur.</li> </ul>
5.	Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i></li> <li>b. Meningkatnya Kualitas tata hubungan antara Perangkat Daerah</li> <li>c. Meningkatnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>d. Meningkatnya Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.</li> </ul>

6	Sistem Manajemen Aparatur ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Kepala SKPD yang Mampu Menjadi Panuan dan Teladan Sebagai Agen Perubahan dan Revolusi Mental</li> <li>b. Meningkatnya Kemampuan unit yang Mengelola SDM ASN untuk Mewujudkan SDM aparatur yang Kompeten dan Kompetitif</li> <li>c. Meningkatnya Kepatuhan Instansi Untuk Penerapan Disiplin aparatur</li> <li>d. Meningkatnya Jumlah instansi yang Mampu Menerapkan Manajemen Kinerja Individu Untuk mengidentifikasi dan Meningkatkan Kompetensi SDM aparatur</li> <li>e. Meningkatnya Profesionalisme aparatur.</li> </ul>
7	Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Keterlibatan Publik dalam Proses Perumusan Kebijakan</li> <li>b. Meningkatnya Kualitas Regulasi Harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.</li> </ul>
8	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik</li> <li>b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat</li> <li>c. Meningkatkan Apresiasi Masyarakat untuk Mengurus Perizinan Sendiri</li> <li>d. Meningkatnya Profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik</li> <li>e. Meningkatkan Citra Aparatur di Mata Masyarakat.</li> </ul>

## BAB V

### RENCANA PROGRAM KERJA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA JAMBI 2019-2023

**Tabel 3**

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
1.	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan penerapan sistem dan rencana tindak lanjut perbaikan/ pengembangan sistem</li> <li>- Meningkatnya pengelolaan perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>	Penggunaan sistem aplikasi <i>e-planning</i> berbasis elektronik dalam perencanaan anggaran yang akuntabel, transparan dan berdaya guna mengakomodir kepentingan seluruh pihak dengan tetap berstandar pada ketentuan yang berlaku	Implementasi Aplikasi <i>e-Planning</i> dan <i>e-Budgeting</i> yang terintegrasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BPKAD</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- Bagian Hukum dan Perundang-undangan</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Penerapan/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.</li> </ul>	Pegawai Memahami Peraturan mengenai Kode Etik, Disiplin PNS, dan Etika Pelayanan  Pegawai Memahami Mengenai Kegiatan Road Map Reformasi Birokrasi.	1. Sosialisasi kembali Peraturan Kode Etik, Disiplin PNS dan Etika Pelayanan			
		2. Fasilitasi Penyusunan Kode Etik Internal SKPD								
		3. Evaluasi Pelaksanaan Ketersediaan Kode Etik Internal SKPD								
		4. Penguatan Penerapan Peraturan WaliKota mengenai Kode Etik, Disiplin PNS dan Etika Pelayanan								
		5. Sosialisasi Kegiatan – Kegiatan dalam bidang/tugas dan fungsi yang mendukung reformasi birokrasi								
		6. Internalisasi dari Pimpinan Kepada Pegawai								
		7. Penyampaian Informasi Tentang Reformasi Birokrasi di Website Pemerintah Kota Jambi.								

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Penerapan Budaya Kerja Positif di Setiap Instansi	Pelaporan Kinerja Pegawai melalui Aplikasi Manajemen Kinerja	1. Perumusan Indikator dalam Penerapan E-Kinerja 2. Tranformasi Manajemen Waktu menuju E-Kinerja untuk menggantikan sistem pemberian tunjangan daerah yang telah ada 3. Sosialisasi Penerapan E-Kinerja lanjutan 4. Implementasi E-Kinerja lanjutan						- BKPSDMD - Bagian Organisasi - Bagian Hukum dan Perundang-undangan
		- Meningkatnya Integrasi Aparatur	Seluruh Pegawai Melaporkan LHKPN dan LHKASN.	1. Sosialisasi Kembali Keputusan Walikota Tentang Wajib LHKPN dan LHKSN.						- Inspektorat - BKPSDMD - Bagian Organisasi - Seluruh Perangkat Daerah
		- Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	Terbentuknya Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi	2. Pengelola Data LHKPN dan LHKSN						
		- Meningkatnya Citra Positif aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat.		3. Evaluasi Data LHKPN dan LHKSN						
				4. Memberikan Teguran Wajib LHKPN dan LHKSN yang tidak melaksanakan kewajiban						
				5. Sosialisasi Kembali Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi						
				6. Penguatan Penerapan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi						
				7. Sosialisasi Revolusi Mental						
				8. Penerapan Sanksi Kepada wajib LHKPN Dan LHKSN bagi aparatur sipil negara yang Melanggar.						
				9. Sosialisasi SK Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi						
				10. Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.						

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1. Evaluasi dan Penyusunan Metodologi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 3. Evaluasi Terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat						- Inspektorat - Bagian Organisasi
2.	<b>PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	- Meningkatkan Keterlibatan Publik dalam proses perumusan Kebijakan - Meningkatkan Kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan Perundang – Undangan. Terselesaikannya pembahasan rancangan peraturan daerah Produk Hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan tidak dibatalkan. Terlaksananya Penataan Dokumentasi Hkum. Tersediannya Informasi produk hukum daerah di website pemerintah kota Jambi.	1. Melaksanakan Sosialisasi produk hukum 2. Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Asistensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi 1. Melakukan Proses Penyusunan Produk hukum Daerah 2. Harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang telah di susun. 1. Penyediaan Buku – buku ilmu hukum dan Peraturan perundang – undangan 2. Pengarsipan Dokumen Sesuai Metode Pengarsipan. Menghimpun data, Pengkoreksian data dan input data produk hukum daerah dala website jdih.jambikota.go.id .						Bagian Hukum dan Perundang-undangan

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
3.	<b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>	- Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan agenda birokrasi nasional	Tersusunnya Raperda dan Naskah Akademik tentang Perangkat Daerah berdasarkan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Evaluasi Tugas Fungsi kelembagaan Eksisting dengan mengacu pada kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah						Bagian Organisasi
				Penyusunan Naskah Akademi Rencana Penataan Kelembagaan						
				Penghitungan Bobot/beban tugas sesuai kewenangan yang dimiliki kota.						
				Evaluasi dan Perumusan kembali Rencana Kelembagaan/OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku						
				Asistensi Perangkat Daerah untuk memetakan Kembali Tugas Fungsi Perangkat Daerah						
		- Meningkatnya Ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan OPD	Terlaksananya analisa beban kerja	Penyusunan Ranperwal Tentang SOTK Perangkat Daerah Yang Menyelaraskan Penghitung Analisa Beban Kerja						Bagian Organisasi
		- Menurunnya Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian /Lembaga dengan Pemerintah Daerah.	Penerbitan perwal tentang SOTK Perangkat Daerah	Proses Legislasi Perda Perangkat Daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah						Bagian Organisasi



NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Sinergisme Kelembagaan Antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersusunnya Peta Jabatan Analisa Jabatan, ABK Pada Sistem	Penyusunan Nomenklatur Jabatan Pada SOTK, Beban Kerja dan Analisa Jabatan Berdasarkan Sistem Kemendagri.						Bagian Organisasi
		- Meningkatnya Sinergisme dan Penguatan Kelembagaan Pada Masing-Masing bidang Pembangunan	Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan	Perubahan/ Proses Legislasi Perwal Tentang Tupoksi dalam Peningkatan Kinerja dan Penyelarasan tujuan Perangkat Daerah						Bagian Organisasi
		- Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tersusunnya Evaluasi Jabatan	Pemberian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Evaluasi Jabatan, Sebagai Bahan Penetapan E-kinerja						Bagian Organisasi
4.	<b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>	- Meningkatnya Penerapan sistem, Proses dan Prosedur Kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government.	Pegawai Memahami Peraturan Kode Etik, Disiplin PNS, Penyusunan SOP dan SP  Tersusunnya Prosedur Kerja Yang Efektif dan Jelas	Sosialisasi Penyusunan SOP dan SP serta Etika Pelayanan.						- BKPSDMD - Diskominfo - Bagian Organisasi - Bagian Hukum dan Perundang-undangan
				Penguatan Penerapan Peraturan Walikota Mengenai Peraturan Kode Etik, Disiplin PNS.						
				Evaluasi SOP Secara Berkala						
				Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan ke Perangkat Daerah						
				Reviu dan Perbaikan(Evaluasi) atas Standar Pelayanan						
				Penyusunan Regulasi <i>E-Government</i>						
		- Meningkatnya Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Terbukanya Informasi Kepada Masyarakat	Pengelolaan Website jambikota.go.id, akun Media Sosial Pemerintah Kota Jambi dan Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat secara online						
		Penguatan PPID Pembantu melalui Sosialisasi								

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Lelang Berbasis IT	Peningkatan Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik						Bagian Pembangunan
				Penguatan Kelembagaan ULP/Pembentukan Lembaga Mandiri						Bagian Pembangunan
		- Meningkatnya Penerapan Manajemen Kearsipan Yang Handal	Manajemen Arsip Berbasis IT	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akuisisi secara digital dan dispersal						Kantor Arsip dan Perpustakaan
				Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)						
				Pengawasan Kearsipan Bekerja Sama Dengan Inspektorat.						
		- Meningkatnya Pelayanan Publik	Nilai Skor SKM terhadap Perangkat Daerah Pelayan	Melakukan Pembinaan Pelayanan Publik Kepada Perangkat Daerah Pelayanan						- BKPSDMD - Inspektorat - Bagian Organisasi
		5. <b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR</b>	- Meningkatnya Kemampuan unit Yang Mengelola SDM ASN untuk Mewujudkan SDM aparatur yang Kompeten dan Kompetitif	Terselenggaranya Rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel	Seleksi Penerimaan CPNSD					
Assesment Test bagi Pejabat Eselon dan JFU/JFT	Assesmen tingkat dasar bagi pejabat baru eselon II, III, dan IV serta JFU/JFT oleh assessor profesional									
Tersusunnya peta jabatan dan uraian jabatan	Penyempurnaan informasi jabatan sesuai perkembangan organisasi									
	Sosialisasi Hasil analisis jabatan kepada seluruh pemangku kepentingan									

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di Lingkungannya	Terbangunya Data base dan sistem informasi kepegawaian	Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG PNS dan NON PNS						BKPSDMD
		- Meningkatnya Kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit	Tingkat Kedisiplinan Pegawai	Sosialisasi Absensi Face Id Online terintegrasi Penerapan Face Id Online terintegrasi Monitoring dan Evaluasi Tingkat kehadiran Pegawai Pembinaan dan Penanganan Disiplin PNS						BKPSDMD
		- Meningkatnya Jumlah instansi yang Mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur.	Penilaian Kinerja Pegawai	Pengukuran Kinerja Individu Pegawai Secara Online Penerapan Aplikasi Online SKP ke SKPD						BKPSDMD
		- Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya	Pemberian Diklat Bagi Pegawai	Pelaksanaan Diklat III dan IV, Diklat Teknis/Fungsi, Diklat fungsional, Pengurusan tugas belajar D3, D4, S1 dan S2 Pembangunan Sistem Aplikasi Diklat Berbasis Kompetensi Evaluasi Aplikasi Diklat						BKPSDMD

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
				Penertiban Buku Profil, buku saku, brosur dan buku DUK						BKPSDMD
				Pengelolaan dokumen fisik PNS/CPNS						
		- Meningkatnya Penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan	Hasil Assesmen sebagai pengembagn SDM, Karir, Manajemen Kinerja	Pembangunan Assesment Center Sesuai Kebutuhan dan Perkembangan Organisasi Oleh Assesor Profesional dan Independen						BKPSDMD
		- Meningkatnya penegndalian penerapan sistem merit dala manajemen SDM aparatur		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Secara Berkelanjutan						BKPSDMD
				Evaluasi Kegiatan Manajemen SDM						
		- Meningkatnya Profesionalisme Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Pegawai	Layanan Konseling Pegawai						
				Penghargaan PNS Berprestasi						
6.	<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>	- Meningkatnya Kapasitas APIP	Kualitas SDM	Peningkatan Profesionalisme APIP						Inspektorat
			Penilaian BPKP	Peningkatan Leveling Auditor Inspektorat Kota Jambi Oleh BPKP dari level 3 menjadi level 4						
		- Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.	Perangkat Daerah Yang meraih predikat WBK/WBBM	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas						Inspektorat
				Penentuan role model zona integritas						
				Evaluasi atas Zona Integritas Yang Telah Ditentukan.						

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Efisiensi Penyelenggaraan Birokrasi	Birokrasi Yang Semakin Profesional	Penyusunan Pedoman Tentang Penanganan Bantuan Kepentingan						Inspektorat
				Sosialisasi dan Implementasi Penanganan Bantuan Kepentingan						
		- Meningkatnya Penetapan Sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis	Penurunan Hasil Pengawasan Internal	Peningkatan Infrastruktur, implementasi serta manajemen resiko di tingkat pemerintah						Inspektorat
				Sosialisasi dan Penerapan Whistle Blowing System						
				Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Penerapan Whistle Blowing						
				Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepada daerah						
				Penerapan Unit Layanan Konsultasi Klinik APBD						
		- Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur	Tingkat pelanggaran disiplin aparatur	Pemantauan kepatuhan penyelenggaraan Negara dalam melaporkan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi						Inspektorat
				Pembentukan Satgas SPIP						
		- Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK	Opini WTP-BPK	Reviu Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Jambi						Inspektorat
				Peningkatan Profesionalisme APIP						

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
7.	<b>PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	- Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	Peraturan Walikota tentang ketepatan waktu penyelesaian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan petunjuk teknis dan penjadwalan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah						- Bappeda - Inspektorat - Bagian Organisasi - Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum dan Perundang-undangan
				Sosialisasi Peraturan Walikota tentang ketepatan waktu penyelesaian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah						
		- Meningkatnya Kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, Transparan dan Profesional	Lelang Barang dan jasa yang Transparan	Pelaksanaan Pengadaan Lelang Berbasis IT						Bagian Pembangunan
			Peningkatan Kualitas SDM yang Profesional	Peningkatan SDM bekerja sama dengan MCE untuk melaksanakan Training Pokja ULP						
		- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai Skor SAKIP Kota Jambi	Peningkatan Pemahaman SKPD tentang Konsep RPJMD						- Bappeda - Inspektorat - Bagian Organisasi - Seluruh perangkat daerah
				Peningkatan Kemampuan SKPD menyusun Renstra dan Renja						
				Peningkatan Kemampuan SKPD Merumuskan Cascading Indikator Kinerja SKPD						
				Peningkatan Kemampuan SKPD Merumuskan Indikator Kinerja Individu dan Rencana Aksi						
				Peningkatan evaluasi dan review dokumen SAKIP						

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
8.	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	- Meningkatnya Sistem Monitoring dan evaluasi Terhadap kinerja pelayanan Publik Meningkatkan Kepatuhan SKPD Layanan Publik Terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan Aplikasi Keluhan Masyarakat secara online						- Diskominfo - Inspektorat - Bagian Organisasi
			Nilai Skor SKM	Pembinaan Kepatuhan Perangkat Daerah Pelayanan Publik terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik						
		- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Seluruh SKPD memiliki SOP, SP dan Etika Pelayanan	Pembinaan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Perangkat Daerah Pelayanan secara mandiri						- BKPSDMD - Inspektorat - Bagian Organisasi - Instansi terkait
				- Penyusunan peraturan Walikota tentang penyusunan SOP, SP dan etika pelayanan - penerapan peraturan Walikota tentang penyusunan SOP, SP dan Etika						
			Penanganan Pengelola Pengaduan Dengan Baik	Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan						
				Penajaman Tugas dan Fungsi dengan penetapan unit yang mengelola pengaduan pelayanan Evaluasi atas Penanganan keluhan/masukan						
		Pemanfaatan TI Dalam Pelayanan Publik	Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis IT (aplikasi)						Instansi Terkait	
			Evaluasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi							

NO	PROGRAM TINGKAT MIKRO	HASIL YANG DIHARAPKAN	KRITERIA KEBERHASILAN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TAHUN					PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2019	2020	2021	2022	2023	
		- Meningkatnya Profesionalisme Aparatur.	Seluruh Pegawai Perangkat Daerah Pelayanan Memahami Etika Pelayanan	Sosialisasi dan Penguatan Etika Pelayanan						- BKPSDMD - Bagian Organisasi
				Pemberian Sanksi dan Reward Bagi Petugas Pelayanan.						
		- Tumbuhnya Inovasi SKPD untuk Perbaikan Pelayanan Publik.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Semakin Banyak.	Sosialisasi Tentang Inovasi Daerah / Inovasi dalam pelayanan						Bagian Organisasi
				Fasilitasi Perangkat Daerah untuk mengikuti Kompetisi						
				Memberikan Reward Kepada Perangkat Daerah yang Mempunyai Inovasi Terbaik						



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi 2018-2023 adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Jambi.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi 2019-2023 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi PD/Unit Kerja dalam menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Jambi.